

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa, menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang selalu ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu penting sebagai bekal dimasa depan. Dengan demikian, di dalamnya pasti terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan pendidikan atau ilmu yang mempersoalkan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu membangun pendidikan menjadi suatu keharusan, baik dilihat dari perspektif internal atau kehidupan intern bangsa maupun dalam perspektif eksternal yang kaitannya dengan kehidupan bangsa-bangsa lain.

Kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan demi terciptanya sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Untuk mengukur kualitas sumberdaya yang terdapat di suatu negara menggunakan suatu indikator global yang dikenal dengan HDI (Human Development Index). Berikut adalah tabel HDI negara-negara ASEAN:

Tabel 1.1

Human Development Index (HDI)

Word Rank	Country	HDI 2019 Data (2020 Report)
9	Singapore	0.935
43	Brunei	0.845
61	Malaysia	0.804
77	Thailand	0.765
106	Philippines	0.712
111	Indonesia	0.707

118	Vietnam	0.693
140	Laos	0.604
145	Myanmar	0.584
146	Cambodia	0.581

Sumber: Global Talent Competitiveness Index (GTCI) report (data diolah)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa, ditingkat ASEAN sendiri negara Indonesia masih menempati posisi yang berada jauh dibawah Singapura (9), Brunei Darussalam (43), Malaysia (61), dan Thailand (77).

Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa, bagaimanapun mesti diprioritaskan, sebab kualitas pendidikan sangat penting. Terlepas persoalan isu-isu pendidikan yang akhir-akhir ini gencar di publikasikan dan didiskusikan diberbagai tempat di seluruh pelosok negeri ini perlu juga kita pahami persoalan penyebaran kualitas pendidikan di setiap provinsi, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari kualitas pendidikan terutama dengan kualitas yang ada di pedesaan masih jauh berbeda dengan pendidikan yang ada.

Adapun faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan kurang baik diantaranya kapasitas SDM guru yang kurang sempurna, upah kesejahteraan guru masih rendah tidak sebanding dengan ilmu yang diberikan, masih banyak sekolahan yang tidak layak digunakan untuk proses pembelajaran, masih ada kekurangan lain yang memang tidak sebanding dengan anggaran negara seperti kurangnya alat peraga dan fasilitas pendidikan masih terlihat seadanya, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Belum lagi skor Indonesia dalam penilain siswa Internaional (PISA), pendidikan Indonesia masih kalah saing dalam peringkat pendidikan lain dari negara Thailand dan Vietnam. Hal ini berkaitan pada kualitas kinerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kota itu sendiri dalam hal merencanakan dan memberikan program-program pendidikan.

Sumber daya manusia menjadi kunci sukses dalam pemberian layanan pendidikan yang berkualitas. Namun pada kenyataannya kualitas kinerja pendidikan belum optimal, pernyataan ini dapat dilihat dari berita detik.com (2017) yang dikatan oleh pemimpin tertinggi di kota Bandung ini bahwa dalam catatannya, sejumlah dinas

yang kinerjanya rendah tersebut di antaranya yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Ridwan Kamil mengatakan bahwa, “Dengan sistem smart city, kita sekarang bisa melacak orang-orang yang kinerjanya rendah. sekitar tujuh ribuan (ASN-red), ada seribuan kinerjanya di bawah 50 persen”. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata yang paling tinggi kinerjanya yakni Kecamatan dengan angka 90 persen. Adapun yang paling rendah diantaranya Dinas Pendidikan masih rendah, dan sisanya rata-rata seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Menurut Kepala Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (2017) menjelaskan bahwa “kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi diantaranya kurangnya inisiatif, tanggung jawab, disiplin, kerjasama dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi”.

Adapun data rata-rata nilai kepegawaian yang diambil dari sub. bagian umum dan kepegawain Dinas pendidikan kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rata-rata Nilai Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung

Perilaku	Nilai				
	2010	2011	2012	2013	2014
Orientasi Pelayanan	78,00	77,00	77,00	80,00	78,00
Integritas	78,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Komitmen	79,00	78,00	77,00	75,00	77,00
Disiplin	78,00	77,00	78,00	79,00	77,00
Kerjasama	80,00	88,00	78,00	77,00	77,00
Jumlah	393	391	389	390	388
Rata-rata	78,6	78,2	77,8	78	7,60
		Turun 0,4	Turun 0,4	Naik 0,4	Turun 0,4

Sumber: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung (data diolah)

Menurut Dedi Ismatullah (2010, hlm. 16), “perkembangan paradigma pemerintah yang sedang dalam proses pergeseran dari *rulling government* menuju kearah *governance* menimbulkan kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, terbuka, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan”. Organisasi pendidikan memiliki fungsi strategis dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan, sehingga tata kelola yang baik menjadi kunci dalam pemberian layanan pendidikan yang baik. Tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu.

Menurut Rahayu (2016), “hasil atau prestasi yang diraih dalam dunia pendidikan secara umum, tidak terlepas dari beberapa unsur yang harus dan tidak boleh dikecualikan untuk mencapai hasil tersebut, yakni seberapa besar peranan pemerintah dalam menanggapi isu-isu pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban akuntabilitas instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dalam implementasinya disesuaikan dengan arahan Mendikbud.

“Penyajian laporan keuangan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka kebutuhan bersama, laporan yang harus dipenuhi yaitu laporan realisasi anggaran” (PP No. 71 Tahun 2010). Dalam hal penyajian laporan keuangan tentu perlu adanya langkah yang diambil oleh pusat dalam bentuk program kerja untuk meningkatkan pasrtispasi dan kesadaran daerah dalam hal alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah. Sehingga memerlukan data-data yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun program agar sejalan dengan masalah dan prioritas pendidikan di setiap daerah. Maka Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melalui suatu kebijakan yang strategis yang berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk membuat “Neraca Pendidikan”. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ingin

meningkatkan partisipasi daerah dalam hal anggaran pendidikan melalui Neraca Pendidikan ini.

Menurut Mardiasno (2010, hlm. 10), “anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Sedangkan anggaran pendidikan menurut UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 menyatakan bahwa, “anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga”.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), “rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah” (Permendagri No.33 Tahun 2017). Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) proses pengeluaran anggaran dipergunakan untuk membangun kesejahteraan pelayanan oleh pemerintah terhadap publik. Salah satu faktor penyebab penyerapan anggaran belum maksimal adalah dikarenakan masih terdapatnya kehati-hatian dan keraguan yang berlebihan dalam menggunakan anggaran sehingga memicu untuk terjadinya penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Dilihat dari data APBN selama 5 tahun dari tahun 2014-2019, anggaran pendidikan mengalami naik dan turun. Adapun data dari LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan APBN dari tahun 2014-2019 dalam bentuk triliun rupiah

Tabel 1.3

LKPP (Lemabaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan APBN

LKPP 2014	353.388,1
LKPP 2015	390.279,0
LKPP 2016	370.810,2
LKPP 2017	406.102,0
LKPP 2018	444.131,4
LKPP 2019	492.455,1

Sumber: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007> (data diolah)

Anggaran pendidikan selalu mengalami naik dan turun, dilihat pada tahun 2016 mengalami penurunan. Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan bahwa penurunan anggaran pendidikan tahun 2016 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya alokasi anggaran pendidikan selama ini ternyata tidak hanya untuk Kemendikbud saja tetapi diberikan juga kepada pemangku kepentingan yang terkait dunia pendidikan seperti Kementerian Agama dan Kemenristekdikti, jadi Kemendikbud selama ini hanya mengelola 10% anggaran pendidikan. Tetapi anggaran pendidikan bisa digunakan secara maksimal jika penggunaannya tepat sasaran karena pemerintah terlalu banyak main-main dengan angka dan tidak sepenuhnya serius dengan dunia pendidikan. Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD belum terealisasi dengan baik. Menurut rencana tahun 2017, menyatakan bahwa “anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD” (UU 1945 pasal 31 ayat 4).

Adapun dalam pidato Presiden Republik Indonesia (2019) mengenai nota keuangan, APBN, “anggaran pendidikan pada 2020 sebesar Rp 505,8 triliun, anggaran ini hanya naik 2,7% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 492,5 triliun, padahal di tahun 2019 anggaran pendidikan mengalami kenaikan sebesar 11,3%”.

Fungsi pendidikan tidak hanya berada dipusat diaplikasikan juga di setiap daerah, sehingga dimasukkan dalam anggaran transfer daerah. Anggaran transfer daerah yaitu bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian di bidang pendidikan. Anggaran transfer Daerah pun mengalami naik dan turun.

Dapat dilihat dari data neraca pendidikan tahun 2015-2018 mengenai anggaran pendidikan daerah, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Anggaran Pendidikan

Tahun	Belanja	Urusan Pendidikan (Dana Daerah+Transfer Daerah Bidang Pendidikan)	Transfer Daerah Bidang Pendidikan	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%)
2015	6,400.77	1,931.42	1,236.59	13.11
2016	7,214.82	2,043.67	1,339.22	11.99
2017	6,855.93	1,219.21	743.71	7.78
2018	7,239.81	1,624.70	910,78	11.28

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran> (data diolah)

Dapat dilihat pada tabel 1.4 anggaran pendidikan daerah pada tahun 2015 transfer daerah dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang begitu drastis. Yang dapat dikatakan bahwa anggaran pendidikan tiap tahunnya tidak mengalami kestabilan akan tetapi mengalami fluktuasi. Urusan pendidikan ini mencakup manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), perizinan pendidikan, serta Bahasa dan sastra.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan Neraca pendidikan dapat di gunakan sebagai kaca pembesar dalam acuan untuk kinerja Dinas pendidikan disetiap masing-masing daerah dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai alat mendemonstrasikan proses akuntabilitas instansi pemerintah sehingga instansi pemerintah tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan programnya. Dengan data yang disajikan ini Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi optimal demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan sehingga dapat dijadikan wujud keterbukaan informasi bagi semua publik.

Menurut hasil penelitian sebelumnya di Kabupaten Barru tahun 2015-2017 dapat disimpulkan bahwa neraca pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2015-2017 terdiri dari pembiayaan APBD setiap tahunnya, APK dan APM Kabupaten Barru, serta mendapatkan dampak yang positif dari neraca pendidikan yaitu Dinas Pendidikan selalu up to date dalam membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran tepat sasaran dan juga dari indeks pembangunan manusia meningkat ditunjang dengan sarana dan fasilitas yang cukup memadai dengan rasio pendidikan yang meningkat dan juga kualitas guru yang memiliki pendidikan yang berjenjang tinggi sehingga sumber daya manusia di Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik dan neraca pendidikan yang ada di Kabupaten Barru dengan indeks pembangunan manusia meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan rerata uji kompetensi guru pada tahun 2015 menjadi 53,30% dengan indeks pembangunan manusia menjadi 69,1% pada tahun 2017 dan hasil ini membuat neraca pendidikan di Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik ditunjang dengan fasilitas yang cukup memadai terdapat dampak positif dalam neraca pendidikan untuk meningkatkan kinerja dinas pendidikan.

Sedangkan menurut penelitian Aksara Nindia (2019) tentang, Transparansi alokasi anggaran melalui neraca pendidikan, mengatakan bahwa adanya neraca pendidikan menjadi transparansi alokasi anggaran, dimana transparansi sangat penting untuk keberlanjutan alokasi anggaran pendidikan supaya tidak ada celah korupsi dan menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bahwa uang pemerintah dialokasikan kependidikan untuk apa saja. Sehingga akan terbangun interaksi sekolah dengan dinas pendidikan serta orangtua dengan dinas setempat. Dan dengan adanya transparansi alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat mengembalikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan berjalan sesuai dengan mestinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Neraca pendidikan diharapkan dapat menggambarkan capaian pendidikan di masing-masing daerah yang dapat diukur sehingga mendorong Walikota dan Bupati untuk mengedepankan pembangunan pendidikan di daerahnya.

Menurut hasil dari penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa rendahnya capaian kemajuan pendidikan di daerah selama ini diduga salah satunya disebabkan

pemerintah daerah yang tidak melaksanakan amanat UUD yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Dari 504 Kabupaten/Kota di Indonesia, menurut data Kemendikbud, hanya lima daerah yang menggelontarkan 20% APBD mereka untuk bidang pendidikan.

Adapun dalam penelitian Devita Ayu Nur Indah Sari (2015) mengenai, Kinerja Dinas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi kasus pada dinas pendidikan kota Malang 2009-2014) yang menjelaskan bahwa, setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berjalan dengan baik. Pengorganisasian anggaran dari APBD juga dapat dialokasikan dengan baik. Namun jika dilihat hasil kerjanya melalui indikator kinerja sesuai dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dan data IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kota Malang, menunjukkan bahwa dari 15 indikator kinerja ada peningkatan pada 9 indikator dan 6 indikator lainnya mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012, sebesar 40% dari indikator kinerja tersebut masih mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapat perhatian yang penting dan perlu untuk lebih diupayakan lagi melalui peningkatan kinerja sesuai dengan kebijakan yang telah disusun.

Hal ini menjadikan neraca pendidikan daerah (NPD) menjadi instrumen penting yang harus di kontrol dengan seksama oleh pemerintah, dan untuk memastikan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Neraca Pendidikan, maka judul dalam penelitian yang diambil adalah “Analisis Dampak Neraca Pendidikan Terhadap Kinerja Dinas Pendidikan di Kota Bandung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi menjadi beberapa masalah yang muncul diantaranya:

1. Rendahnya kualitas pendidikan.
2. Kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pendidikan mengenai penggunaan anggaran pendidikan.

3. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana pendidikan yang diberikan pemerintah.
4. Kurangnya pemahaman publik mengenai neraca pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran neraca pendidikan?
2. Bagaimana gambaran kinerja dinas pendidikan dalam penggunaan anggaran pendidikan di kota Bandung?
3. Bagaimana dampak neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran neraca pendidikan?
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kinerja dinas pendidikan dalam penggunaan anggaran pendidikan di kota Bandung?
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan kota Bandung?

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan di kota Bandung.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan di kota Bandung.

- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai media informasi terkait konsep keilmuan tentang pengaruh neraca pendidikan terhadap kinerja dinas pendidikan di kota Bandung.

F. Definisi Operasional

a. Dampak

Menurut kamus KBBI mempunyai arti sebagai benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Adapun arti dampak secara sederhana yaitu sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

b. Neraca Pendidikan

Dalam terminologi keuangan neraca menggambarkan laporan keuangan dari sebuah intensitas dalam periode tertentu. Neraca akan menggambarkan posisi keseimbangan antara input dan output dari proses. Neraca Pendidikan merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah. Dalam neraca pendidikan ini yang didalamnya terdapat gambaran aktifitas Pendidikan di daerah yang melingkupi pengaggaran, guru, fasilitas, ujian nasional, dan seluruh aspek yang terdapat pada aktifitas pendidikan.

c. Kinerja

Menurut Yusniar Lubis, Bambang Hermanto & Emron Edison (2019, hlm. 26) "Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan, standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu instansi atau perusahaan agar dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Adapun kinerja dalam organisasi suatu keberhasilan atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan namun atasan diperusahaan atau disuatu intansi kadang jarang ada yang peduli kecuali kinerja sudah sangat buruk sehingga mengakibatkan perusahaan atau intansi menghadapi krisis yang buruk. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini ditulis berdasarkan Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diterbitkan oleh Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Pasundan tahun 2019, sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berdasarkan buku panduan penulisan KTI (2020, hlm. 27) “Pendahuluan bermaksud mengantarkan pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Esensi dari bagian pendahuluan adalah pernyataan tentang masalah penelitian”. Adapun bagian pendahuluan skripsi berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Identifikasi Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian
- f. Definisi Operasional
- g. Sistematika Skripsi

2. BAB II Kajian Teori

Berdasarkan buku panduan penulisan KTI (2020, hlm. 30) dijelaskan kajian teori dan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kajian teori berisi deskripsi teoritis yang memfokuskan kepada hasil kajian teori, konsep, kebijakan, dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian. Melalui kajian teori peneliti merumuskan definisi konsep dan definisi operasional variabel. Kajian teori dilanjutkan dengan perumusan

kerangka pemikiran yang menjelaskan berkaitan dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian

Berdasarkan buku panduan penulisan KTI (2020, hlm. 30) “Bab ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam menjawab pertanyaan permasalahan dan memperoleh simpulan”. Bab ini berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Metode Penelitian
- b. Desain Penelitian
- c. Subjek Dan Objek Penelitian
- d. Pengumpulan Data Dan Instrument Penelitian
- e. Teknik Analisis Data
- f. Prosedur Penelitian

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan buku panduan penulisan KTI (2020, hlm. 34) “Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan”.

5. BAB V Kesimpulan Dan Saran

Simpulan merupakan uraian yang menyajikan penafsiran pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. Simpulan harus menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang disajikan pemaknaan peneliti terhadap semua hasil dan temuan penelitian.

Saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.